

**PARIWISATA INKLUSIF : TANTANGAN
DALAM MEWUJUDKAN DESTINASI WISATA
RAMAH DIFABEL DI YOGYAKARTA**
(Studi Kasus di Destinasi Wisata Taman Sari
Yogyakarta)

Mona Erythrea Nur Islami¹, Katarina Fausti Na Bine Sogen², Kristiana Dwi Sarina³,
Yosefa Maristella Trisnice⁴

¹STP Ampta Yogyakarta, monaerythrea@gmail.com

²STP Ampta Yogyakarta, katarinabine7@gmail.com

³STP Ampta Yogyakarta, Dwisarinakristiana@gmail.com

⁴STP Ampta Yogyakarta, trisnydandara02@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata inklusif merupakan satu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal untuk terlibat dan menikmati manfaat ekonomi, sosial, budaya dari sektor pariwisata. Pendekatan ini menekankan keadilan sosial, partisipasi, dan aksesibilitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan destinasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Yogyakarta dengan mengambil satu studi kasus di destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi serta mendeskripsikan peran pemerintah kota Yogyakarta untuk mewujudkan destinasi wisata inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Taman Sari sudah berupaya untuk mewujudkan destinasi wisata ramah difabel dengan membangun fasilitas untuk difabel, melatih pemandu dengan ketrampilan bahasa isyarat. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena Taman Sari masih menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan-keterbatasan dalam upaya mewujudkan destinasi wisata yang bisa diakses untuk semua golongan. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah struktur bangunan yang termasuk dalam cagar budaya, keterbatasan anggaran, kurangnya ketrampilan SDM, kurangnya partisipasi sosial. Rekomendasi dari penelitian ini adalah prioritas anggaran untuk pembangunan sarana prasarana bagi pengunjung difabel, komitmen dan kolaborasi antara pengelola, pemerintah, dan masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan wisata ramah difabel, pelibatan komunitas difabel yang lebih intensif serta dukungan pemerintah untuk mewujudkan pariwisata inklusif di Yogyakarta.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Kesetaraan, Inklusi Sosial, Ramah Disabilitas, Destinasi Inklusif

ABSTRACT

Inclusive tourism is an approach aimed at providing equal opportunities for all segments of society including persons with disabilities and marginalized groups—to participate in and benefit from the economic, social, and cultural advantages of the tourism sector. This approach emphasizes social justice, participation, and accessibility as key foundations in destination development. This study aims to examine the implementation of inclusive tourism policies in Yogyakarta by conducting a case study at the Taman Sari tourism site. It describes the challenges encountered and explores the role of the Yogyakarta City

Government in realizing an inclusive tourism destination. This research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that Taman Sari has made efforts to become a disability-friendly destination by constructing accessible facilities and training guides in sign language. However, these efforts remain suboptimal due to several ongoing challenges and limitations in making the destination fully accessible to all groups. The main inhibiting factors include the site's status as a cultural heritage structure, budget constraints, limited human resource capacity, and low levels of social participation. This study recommends prioritizing budget allocations for accessible infrastructure development, fostering commitment and collaboration among site managers, local government, and communities to create a disability-friendly environment, increasing the involvement of disability communities, and strengthening government support to realize inclusive tourism in Yogyakarta.

Keywords: *accessibility, equality, social inclusive, disability-friendly, inclusive destinations*

PENDAHULUAN

Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya dan sejarah, menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk menciptakan lingkungan wisata yang benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas. Implementasi efektif dari regulasi ini di sektor pariwisata masih dihadapkan pada berbagai kendala yang kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin et al. (2023) mengungkap bahwa meskipun terdapat upaya dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta pelaku industri pariwisata, seperti penyelenggara tur berjalan (Walking-Walking Tour Organizer), untuk menyediakan fasilitas yang lebih inklusif, namun masih saja menghadapi kendala dan keterbatasan. Banyak tempat wisata di Yogyakarta yang belum memenuhi kriteria dasar aksesibilitas, seperti jalur yang dapat diakses kursi roda, toilet yang ramah difabel, serta informasi yang dapat diakses oleh semua pengunjung. Studi yang dilakukan oleh Perdana (2023) menekankan bahwa objek wisata terkenal seperti Malioboro, yang merupakan salah satu destinasi utama di Yogyakarta, masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Kendala-kendala utama yang diidentifikasi mencakup kurangnya fasilitas yang memadai, seperti ramp dan jalur khusus bagi pengguna kursi roda, serta minimnya informasi dan tanda-tanda yang dapat diakses oleh pengunjung

dengan gangguan penglihatan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas juga menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Yogyakarta, Taman Sari berada di pusat kota Yogyakarta, hanya sekitar 2 kilometer dari Keraton Yogyakarta, dan berjarak 4 kilometer dari Malioboro. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi titik fokus bagi para peneliti dan pengunjung. Atraksi utama di Taman Sari adalah bangunan bersejarah yang terbuat dari kombinasi arsitektur lokal dan pengaruh Portugis, yang dirancang oleh arsitek Demang Tegis. Taman Sari dibangun antara tahun 1758 dan 1765 oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tempat rekreasi dan meditasi bagi keluarga kerajaan. Pengunjung dapat menjelajahi kolam renang, taman, dan bangunan yang dulunya berfungsi sebagai tempat pertahanan dan persembunyian. Setiap sudut Taman Sari memancarkan keindahan yang menggugah rasa ingin tahu tentang sejarah dan budaya Yogyakarta. Sebagai destinasi wisata unggulan, Taman Sari juga sudah berupaya untuk menjadi destinasi yang inklusif, bisa dikunjungi oleh semua golongan. Namun demikian, proses pengembangan Taman Sari menjadi destinasi yang inklusif mengalami hambatan-hambatan. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2016) terhadap

ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas publik untuk penyandang disabilitas di destinasi wisata di Yogyakarta, menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih kurang di beberapa destinasi wisata, termasuk di Taman Sari. Hasil penelitian Zakiyah menjadi referensi yang menarik untuk dikaji lebih dalam terkait upaya Taman Sari untuk mewujudkan destinasi wisata inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pariwisata inklusif di destinasi wisata Taman Sari, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh destinasi wisata Taman Sari dalam mewujudkan destinasi wisata ramah difabel. Selain itu untuk mendeskripsikan peran pemerintah (dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta) dalam mendukung pariwisata inklusif di Kota Yogyakarta.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis oleh pemerintah untuk menjawab persoalan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Permatasari (2021), kebijakan publik melibatkan proses yang kompleks mulai dari perumusan masalah, analisis alternatif, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi dampak. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis, karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda. Implementasi yang efektif mensyaratkan koordinasi antarlembaga, sumber daya yang memadai, dan dukungan dari masyarakat. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang berjalan.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan pariwisata inklusif merupakan salah satu contoh kebijakan yang bertujuan

untuk menjamin seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari pariwisata. Pariwisata inklusif merupakan pendekatan yang menempatkan keadilan sosial, partisipasi, dan aksesibilitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan destinasi. (Astawa dkk.,2013; Lestari, 2022) menekankan bahwa “pariwisata inklusif harus mampu memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok marjinal, untuk terlibat dan menikmati manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari sektor pariwisata.” Kelompok masyarakat yang inklusif harus dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. (Fairuza, 2017). Konsep ini menjadi bagian integral dari pembangunan pariwisata berkelanjutan, di mana aspek keberlanjutan sosial tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang menjamin hak dan akses setara bagi semua warga negara.

Pariwisata inklusif merupakan konsep yang menekankan pentingnya aksesibilitas dan keberlanjutan dalam industri pariwisata, sehingga semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati pengalaman wisata tanpa hambatan. Hal ini mencakup pengembangan fasilitas yang ramah disabilitas, penyediaan transportasi yang aksesibel, serta penyelenggaraan aktivitas dan tur yang memperhatikan kebutuhan berbagai kalangan.

Aksesibilitas merupakan hak dasar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Propiona (2021) menekankan bahwa penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan lingkungan yang membatasi akses mereka terhadap fasilitas publik, yang pada akhirnya mengarah pada eksklusi sosial. Sejak Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, diharapkan kesadaran sosial tentang hak-hak penyandang disabilitas meningkat.

Peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam menciptakan kebijakan, regulasi, serta penyediaan infrastruktur dan layanan yang mendukung inklusi secara menyeluruh di sektor pariwisata. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, kolaborasi antar stakeholder sangat penting untuk mencapai tujuan bersama yakni pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Fatin et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci sukses dalam pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pembagian tanggung jawab dan sumber daya secara efektif sehingga dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, teori stakeholder tidak hanya menyoroti identifikasi dan kepentingan pihak terkait, tetapi juga menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama yang harmonis antar pemangku kepentingan untuk menciptakan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Stakeholder dalam konteks pariwisata merujuk pada individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh perkembangan pariwisata di suatu daerah. Pemerintah (dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pariwisata inklusif melalui berbagai fungsi yang dapat dijalankannya. Oktalia (2025) mengkaji bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab sentral dalam menjamin tersedianya infrastruktur dan kebijakan yang inklusif. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik tetapi juga inklusif, sehingga semua individu dapat menikmati keindahan dan keunikan budaya yang ditawarkan oleh objek wisata. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pariwisata inklusif yang telah diterapkan di destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta.

Analisis implementasi kebijakan digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks yang muncul terhadap penerapan suatu kebijakan. Hasil analisis implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Taman Sari dapat digunakan sebagai evaluasi untuk menilai keberhasilan dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan pariwisata inklusif dan tantangan dalam mewujudkan destinasi ramah difabel di Yogyakarta. Dimensi kebijakan yang dianalisis menyangkut penyediaan fasilitas dan pelayanan yang bisa diakses oleh pengunjung disabilitas, sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah DIY No. 4 Tahun 2012. Studi kasus didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang melakukan eksplorasi suatu fenomena dalam konteksnya dengan menggunakan data dari berbagai sumber (Baxter & Jack, 2008). Studi kasus menyiratkan peneliti melakukan analisis secara intensif pada unit analisis yang diteliti (*case*) (Sarosa, 2017). Sebuah *case* dapat berupa satu individu, satu organisasi, satu peristiwa, satu keputusan, satu periode, atau sistem yang dapat dipelajari secara menyeluruh dan holistik (Thomas, 2011).

Lokasi penelitian adalah destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta, yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Pemilihan Taman Sari karena destinasi tersebut merupakan salah satu destinasi utama di Yogyakarta dan telah berupaya untuk mewujudkan destinasi wisata ramah difabel. Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sample*, dimana pengelola destinasi wisata Taman Sari dan pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang menjadi informan dalam penelitian ini. Penentuan informan di destinasi Taman Sari didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dalam pengembangan wisata inklusif. Sehingga informan bisa memberikan informasi

secara detail dan benar. Sedangkan penentuan informan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, karena dinas ini bertanggungjawab terhadap pengelolaan destinasi-destinasi wisata di Kota Yogyakarta, termasuk Taman Sari. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terhadap informan informan kunci. Selain itu mengkaji berbagai dokumen resmi, berupa laporan, dan regulasi terkait kebijakan pariwisata inklusif di Yogyakarta. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan analisis data kualitatif dari Creswell (2014) dibantu dengan penggunaan aplikasi Nvivo. Tahapan analisis data sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan dan menyiapkan data yang akan dianalisis.
2. Data mentah yang akan dianalisis diorganisasikan berdasarkan tanggal pengumpulan data, sumber datanya, jenis data, deskripsi data, sifat data.
3. Reduksi data
4. Peneliti harus membaca seluruh data yang terkumpul supaya dapat mengetahui data yang diperoleh, sumber data dan maknanya. Setelah memahami seluruh data, maka peneliti akan dapat mereduksi, memilah, dan memilih data penelitian.
5. Membuat koding seluruh data
6. Koding adalah proses memberi tanda terhadap data yang telah dikelompokkan. Kelompok data yang sejenis diberi kode yang sama. Koding dilakukan dengan bantuan *software* Nvivo. Melalui koding peneliti dapat menghasikan kategorisasi atau menentukan tema-tema.
7. d.Menghasilkan tema atau kategorisasi data
8. Melalui koding, peneliti menghasilkan tema-tema atau kategorisasi data penelitian yang merupakan temuan. Berdasarkan tema-tema yang dihasilkan tersebut, selanjutnya peneliti membuat deskripsi singkat dan sistematis sehingga tema-tema yang ditemukan

menjadi lebih jelas. Proses menemukan tema-tema dengan bantuan *software* Nvivo.

9. e.Menghubungkan antar tema dan memberi makna tentang tema
10. Setelah peneliti menemukan tema-tema penelitian, langkah selanjutnya adalah mencari keterkaitan antar tema atau kategori satu dengan tema atau kategori yang lain. Hasil mengkonstruksi hubungan antar tema atau kategori selanjutnya perlu diberikan interpretasi sehingga bisa dipahami orang lain.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pariwisata Inklusif di Taman Sari Yogyakarta

Kebijakan Pariwisata inklusif di Yogyakarta didasarkan pada peraturan daerah DIY No. 4 Tahun 2012, sebagai upaya untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tujuan utama pengembangan pariwisata inklusif adalah menciptakan lingkungan wisata yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial, dengan memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, fasilitas dan aksesibilitas bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Yogyakarta menunjukkan kemajuan yang bertahap, meskipun masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satu contoh nyata dari upaya ini dapat dilihat di Taman Sari, sebuah objek wisata budaya yang terkenal di Yogyakarta. Pengelola Taman Sari telah berupaya mengadopsi beberapa prinsip inklusivitas untuk memastikan aksesibilitas bagi semua pengunjung. Upaya yang sudah dilakukan adalah membangun sarana prasarana untuk aksesibilitas dan menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Pembangunan sarana prasarana di destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Sarana Prasarana untuk Aksesibilitas Pengunjung Disabilitas

No	Aksesibilitas	Panjang Jalur
----	---------------	---------------

1	Jalur Rata	2,4 M
2	Jalur Pedestrian Searah	120 cm
3	Jalur Pedestrian Dua Arah	160 cm
4	Bordes	160 cm

Sumber : Data primer (2025)

Adapun fasilitas yang sudah disediakan di Taman Sari dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Fasilitas untuk Pengunjung Disabilitas

No.	Fasilitas	Jumlah
1	Kursi Roda	1
2	Toilet untuk Difabel	1

Sumber : Data primer (2025)

Penyediaan sarana prasarana untuk aksesibilitas dan fasilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus merupakan langkah awal yang penting dalam menerapkan konsep inklusif. Kebijakan ini sejalan dengan konsep *universal design* yang diusung oleh UNWTO (United Nations World Tourism Organization) pada tahun 2016, yang menekankan pentingnya menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh semua pengunjung tanpa diskriminasi. Meskipun demikian, ada beberapa dimensi yang masih perlu diperhatikan. Implementasi kebijakan inklusif di Taman Sari, misalnya, belum sepenuhnya menyentuh aspek komunikasi. Papan informasi dengan huruf braille, panduan audio, belum disediakan oleh pengelola. Sedangkan pemandu yang memiliki kemampuan bahasa isyarat masih satu orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, masih ada tantangan signifikan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan pariwisata inklusif di Yogyakarta. Dengan demikian, meskipun langkah-langkah awal telah diambil dalam implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Yogyakarta, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengunjung, tanpa kecuali, dapat menikmati keindahan dan kekayaan budaya Yogyakarta. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Tantangan dalam Mewujudkan Destinasi Wisata Ramah Difabel

Mewujudkan destinasi ramah difabel di Taman Sari, sebagai cagar budaya yang kaya sejarah, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini dapat dikelompokkan dalam tiga aspek : struktur fisik warisan budaya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia, serta partisipasi sosial. Mari kita bahas masing-masing aspek secara mendetail.

1. Struktur Fisik Warisan Budaya

Salah satu tantangan terbesar menjadikan Taman Sari sebagai destinasi ramah difabel adalah statusnya sebagai cagar budaya. Hal ini membatasi kemungkinan modifikasi arsitektur yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas. Banyak area di Taman Sari masih sulit dijangkau oleh difabel, terutama karena adanya tangga, lorong sempit, dan permukaan yang tidak rata. Bapak Iwan, selaku pengelola Taman Sari, menjelaskan, “Kami tidak bisa sembarangan membangun atau mengubah struktur bangunan.” Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi dalam upaya memperbaiki aksesibilitas di tempat yang memiliki nilai sejarah tinggi. Meskipun ada keinginan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, perlindungan terhadap warisan budaya sering kali menghalangi perubahan yang diperlukan.

2. Keterbatasan Dana dan Sumber Daya Manusia

Aspek lain yang menjadi tantangan adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas aksesibel sangat terbatas, sementara biaya yang diperlukan untuk menciptakan infrastruktur yang ramah difabel cukup tinggi. Dalam konteks ini, Bapak Iwan menyatakan, “Kami ingin memberikan yang terbaik, tetapi anggaran yang ada tidak mencukupi untuk semua kebutuhan.”

Keterbatasan ini membuat banyak proyek aksesibilitas terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. Selain itu, pelatihan untuk petugas dalam hal pelayanan kepada difabel, seperti bahasa isyarat atau teknik pelayanan untuk tunanetra, belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung difabel.

3. Partisipasi Sosial

Masyarakat sering kali kurang memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi difabel. Edukasi mengenai hak-hak dan kebutuhan difabel masih minim, yang menyebabkan stigma dan diskriminasi di kalangan masyarakat. Terkait dengan hal ini, Bapak Iwan berpendapat, “Kita perlu melibatkan masyarakat dalam setiap langkah untuk menciptakan ruang yang inklusif. Tanpa kesadaran dan dukungan dari masyarakat, usaha kita akan sia-sia.” Membangun kesadaran akan pentingnya aksesibilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

4. Partisipasi Komunitas Difabel Belum Maksimal

Pelibatan komunitas difabel dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan masih sering kali bersifat simbolis dan tidak terstruktur secara rutin. Hal ini sangat disayangkan, mengingat prinsip *"nothing about us without us"* yang dikemukakan oleh Charlton (1998) menekankan pentingnya partisipasi aktif dari komunitas difabel di setiap tahap kebijakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Iwan, “Kami pernah diskusi dengan komunitas difabel... tapi memang belum rutin.” Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam

menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi difabel.

5. Tantangan Pelibatan

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya pelibatan komunitas difabel, implementasinya masih jauh dari harapan. Kurangnya rutinitas dalam dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan komunitas difabel berpotensi menghambat pengembangan kebijakan yang efektif dan relevan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga pada kepercayaan dan partisipasi aktif dari komunitas difabel itu sendiri.

6. Komitmen dan Kolaborasi

Untuk mewujudkan destinasi yang ramah difabel, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi multisektor menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan. Pendanaan yang berkelanjutan juga menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mendukung komunitas difabel dapat diimplementasikan secara efektif dan terus menerus. Mewujudkan Taman Sari sebagai destinasi ramah difabel memang bukan hal yang mudah. Tiga tantangan utama struktur fisik warisan budaya, keterbatasan dana dan sumber daya manusia, serta partisipasi sosial perlu diatasi secara bersamaan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua golongan. Dengan demikian, Taman Sari dapat menjadi contoh nyata dari destinasi wisata yang tidak hanya melestarikan warisan budaya,

tetapi juga memperhatikan kebutuhan semua pengunjung, termasuk difabel.

Dengan memperhatikan tantangan dan komitmen yang diperlukan, penting bagi semua pihak untuk mengambil langkah konkret dalam melibatkan komunitas difabel secara lebih aktif dan terstruktur. Tidak cukup hanya melakukan diskusi sesekali, melainkan harus ada mekanisme yang jelas dan berkelanjutan untuk memastikan suara dan kebutuhan komunitas difabel didengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk menciptakan destinasi yang tidak hanya ramah bagi difabel, tetapi juga memperkaya pengalaman bagi semua pengunjung.

Peran Pemerintah

Pariwisata inklusif merupakan pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati kesempatan yang sama dalam pengalaman wisata. Pemerintah memegang peranan kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pariwisata inklusif melalui tiga fungsi utama: sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator.

1. Sebagai Regulator

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan teknis yang menjadi dasar hukum dalam pembangunan aksesibilitas wisata. Contohnya adalah penerapan peraturan daerah (Perda) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan regulasi nasional seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR). Kebijakan-kebijakan ini memastikan bahwa infrastruktur pariwisata dibangun dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi semua orang. Di Yogyakarta, aturan dan program yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata untuk mendukung pengembangan destinasi wisata ramah difabel adalah : 1). Program Destinasi Inklusif di

beberapa destinasi wisata unggulan, misalnya, Taman Pintar, Malioboro dan keraton; 2). Penyusunan Pedoman Teknis Aksesibilitas Wisata berdasarkan SNI 03-1735-2000 dan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2017; 3). Kolaborasi dengan Dinas Sosial dan Dinas PUP-ESDM untuk memastikan pembangunan infrastruktur wisata ramah difabel. Proses pembuatan kebijakan juga melibatkan kelompok difabel atau organisasi peduli difabel di Yogyakarta, seperti, Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan akademisi dari UGM. (Wawancara dengan pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025).

2. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam memberikan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan bantuan pendanaan awal untuk mendukung pengembangan pariwisata inklusif. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, misalnya, telah menginisiasi penciptaan aplikasi digital "Jogja Akses" yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas wisatawan difabel. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua wisatawan.

3. Sebagai Koordinator

Pemerintah juga berfungsi sebagai koordinator antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat. Sinergi ini sangat penting dalam pengembangan infrastruktur pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi untuk mengimplementasikan konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular (BGCE) yang mendukung promosi pariwisata inklusif (Siaran Pers Kemenpar,2024). Peran pemerintah dalam mendukung pariwisata inklusif sangatlah signifikan. Dari regulasi

yang jelas, fasilitasi pelatihan dan pendanaan, hingga koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan aksesibilitas dan pengalaman yang setara bagi semua wisatawan, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang memfasilitasi pertumbuhan pariwisata yang lebih inklusif dan ramah bagi semua.

PENUTUP

Pariwisata inklusif merupakan pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan pada keadilan bagi semua golongan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan destinasi-destinasi wisata di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan pariwisata inklusif. Namun demikian, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi baik pemerintah maupun destinasi wisata dalam mewujudkan destinasi wisata ramah difabel. Identifikasi upaya yang sudah dilakukan dan tantangan yang dihadapi salah satu destinasi wisata yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah destinasi wisata Taman Sari Yogyakarta. Kajian terhadap implementasi kebijakan dengan pendekatan studi kasus membuktikan bahwa pendekatan pariwisata inklusif belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Meski Beberapa upaya telah dilakukan oleh Taman Sari untuk mewujudkan destinasi wisata ramah difabel, antara lain, penyediaan jalur rata dan pegangan untuk difabel, penyediaan toilet untuk difabel serta melatih pemandu dengan ketrampilan bahasa isyarat untuk pengunjung difabel. Sejumlah tantangan dihadapi oleh Taman Sari dalam upaya mewujudkan destinasi wisata inklusif.

Keterbatasan dana dan sumber daya manusia, bangunan yang termasuk kedalam cagar budaya, partisipasi masyarakat dan kaum difabel yang belum maksimal, serta belum efektifnya kerjasama antar pemangku kepentingan merupakan tantangan-tantangan yang

harus diatasi. Rekomendasi dari hasil penelitian adalah prioritas anggaran untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan untuk pengunjung difabel, pelibatan kaum difabel dan partisipasi sosial secara lebih intensif dalam pengambilan keputusan, komitmen dan kolaborasi antara pengelola, masyarakat lokal dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pariwisata inklusif di Yogyakarta

REFERENSI

- Agustin, V. M., Subandi, Y., Wiratma, H. D., & Nurgiyanti, T. (2023). Implementasi ratifikasi CRPD dalam bidang pariwisata di Yogyakarta (Studi kasus: Walking-Walking Tour Organizer). *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6), 422–432. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/552>
- Astawa, I. P. M., Wardana, I. M., Sukaatmadja, I. P. G., & Sukawati, T. G. R. (2013). *Pariwisata inklusif dalam pariwisata berkelanjutan*.
- Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, vol. 13, no. 4
- Charlton, J. I. (1998). *Nothing about us without us: Disability oppression and empowerment*. University of California Press.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design*. Fourth Edition; Sage, Los Angeles.
- Darcy, S., & Buhalis, D. (2011). *Accessible tourism: Concepts and issues*. Channel View Publications.
- Detik Travel. (2024). *Kemenpar dorong wisata inklusif, ramah disabilitas di Indonesia*. detikTravel. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7725185/kemenpar-dorong-wisata-inklusif-ramah-disabilitas-di-indonesia>
- Fatin, A. D., Devina, F., & Musleh, M. (2023). Kolaborasi stakeholder dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa

- Wisata Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pariwisata*, 10(2), 123–136. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/22207>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-13.
- Lestari, F., Kagungan, D., & Meutia, I. F. (2022). Sinergitas Aktor Pentahelix dalam Pembangunan Inklusif Pada Sektor Pariwisata Berbasis Agrowisata Kampoeng Kopi. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 9-18.
- Oktalia, S. (2025). Analisis peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (Dalam kajian teori implementasi kebijakan Adam Smith) [Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. *Repository UIN Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/42137>
- Perdana, F. R. (2023). Aksesibilitas difabel pada objek wisata Malioboro. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 4(1), 66–84. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ji/article/view/10911>
- Permatasari, I. A. (2021). Kebijakan Publik: Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan. *The Journalish*, 1(1), 1–10. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Propiona, J. K. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10, 1–16. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/47635>
- Sarosa, Samiaji.(2017). *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar*. Edisi Kedua. Penerbit Indeks Jakarta
- Thomas, G. (2011). A Typology for The Case Study in Social Science Following a Review of Definition, Discourse and Structure. *Qualitative Inquiry*, vol.17, no. 6
- UNESCAP. (2021). *Disability-inclusive tourism in Asia and the Pacific*. United Nations.
- UNWTO. (2016). *Manual on accessible tourism for all: Principles, tools and best practices*. World Tourism Organization.
- Zakiyah, U., Husein, R., & Muzwardi, A. (2016). Pelayanan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Studi Fasilitas dan Aksesibilitas Pariwisata untuk Disabilitas di Kota Yogyakarta.

BIODATA PENULIS

Mona Erythrea Nur Islami, SIP, M.A., merupakan dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, sejak Tahun 2000. Lulus S-1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 1998. Lulus S-2 Ilmu Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada Tahun 2014. Spesifikasi pada Ilmu Antropologi Pariwisata.

Katarina Fausti Na Bine Sogen, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, Program Studi Pariwisata (S-1). Angkatan Tahun 2023.

Kristiana Dwi Sarina, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, Program Studi Pariwisata (S-1). Angkatan Tahun 2023.

Yosefa Maristella Trisnice, merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Ampta Yogyakarta, Program Studi Pariwisata (S-1). Angkatan Tahun 2023.